

Perempuan Diberdayakan — Perempuan dalam Parlemen di Afrika Selatan¹

MAVIVI MYAKAYAKAYA-MANZINI

“Kebebasan tidak akan dapat dicapai kecuali kalau perempuan telah dimerdekan dari segala bentuk penindasan. Kita semua berangkat dari sini dan menegaskan bahwa tujuan Program Rekonstruksi dan Pembangunan tidak akan dapat terwujud kecuali kalau kita memandangnya dalam bentuk-bentuk praktis yang terlihat bahwa kondisi perempuan di negara kita telah berubah secara radikal menjadi lebih baik, dan bahwa mereka telah diberdayakan untuk berkiprah dalam segala aspek kehidupan yang setara dengan setiap anggota masyarakat lainnya.”

Presiden Nelson Mandela, 24 Mei 1994

Cita-cita: Kesetaraan Gender

Dari 490 anggota yang dipilih untuk Majelis Nasional dan Senat (kini Dewan Nasional Provinsi-provinsi) pada bulan April 1994, 117 orang diantaranya adalah perempuan – 109 untuk Majelis Nasional dan 8 di Senat. Ini merupakan perubahan drastis dari pemerintahan apartheid sebelumnya di mana perempuan hanya memiliki 2,8 persen dari wakil-wakil yang ada di parlemen. Dalam pemilihan nasional tahun 1999, perempuan mencakup 29,8 persen dari jumlah wakil publik terpilih, yang menempatkan Afrika Selatan dalam ranking 10 besar dalam hal keterwakilan perempuan, dan representasi kedua terbesar di wilayah Komunitas Pembangunan Afrika Bagian Selatan.

Pemerintahan baru dan parlemen telah mengambil berbagai langkah untuk memajukan posisi perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di segala bidang. Komitmen pada kesetaraan gender dalam pemerintah baru kian dipertegas oleh terpilihnya Dr. Frene Ginwala sebagai ketua, Majelis Nasional, dan kemudian dengan pengangkatan Baleka Kaositsile sebagai wakil ketua. Peningkatan jumlah perempuan yang dipilih untuk posisi eksekutif selanjutnya turut memperkuat komitmen itu. Sedangkan pemerintahan apartheid pada tahun 1994 hanya mempunyai satu menteri yang perempuan (Kesehatan) dan seorang wakil menteri (Kehakiman). Dalam kabinet yang dibentuk pada tahun 1999, 9 dari 29 menteri yang ada adalah perempuan (31 persen). Sebuah panitia gabungan untuk peningkatan mutu hidup dan status perempuan juga telah dibentuk untuk memainkan peran supervisi dan pemantauan di parlemen.²

Pada pembukaan parlemen pertama Afrika Selatan yang demokratis dan representatif pada 24 Mei 1994, Presiden Mandela berjanji pada parlemen untuk kesetaraan gender dan emansipasi perempuan.

Peningkatan partisipasi politik perempuan merupakan hasil dari dua faktor utama: pertama, ia adalah hasil perjuangan para perempuan dalam Kongres Nasional Afrika (ANC) yang terlibat aktif selama beberapa dasawarsa dalam perjuangan untuk pembebasan nasional dan emansipasi sosial; dan kedua, merupakan hasil dari mekanisme kebijakan dan tindakan afirmatif yang diterapkan oleh ANC. Dari 119 perempuan yang terpilih masuk ke parlemen pada tahun 1999, 96 (80 persen) diantaranya berasal dari ANC.

Konstitusi Baru

Perempuan memainkan peran luar biasa dalam merancang Konstitusi Afrika Selatan yang baru. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa pasal-pasal yang menyentuh hak-hak mereka dan kehidupan mereka dimasukkan kedalam konstitusi. Ini bukanlah tugas yang mudah karena mereka harus meyakinkan bukan saja partai-partai mereka, tetapi juga seluruh majelis konstitusional. Konstitusi yang baru ini melindungi banyak hak kritis perempuan, termasuk hak persamaan; hak kebebasan dan keamanan dari orang tersebut (termasuk hak kebebasan dari kekerasan); hak membuat keputusan mengenai reproduksi, serta hak keamanan dan kontrol terhadap tubuh sendiri.

Konstitusi baru juga memuat banyak hak yang tidak hanya menguntungkan kaum perempuan tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan yang sama bahkan bagi kalangan perempuan termiskin. Hak-hak ini termasuk hak untuk memperoleh pendidikan; hak kepemilikan; hak untuk lingkungan yang bersih; akses ke perumahan yang memadai; akses layanan perawatan kesehatan; kecukupan pangan dan air; dan jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu atau orang yang tergantung pada dirinya. Negara diwajibkan untuk mencoba, dengan sumber yang tersedia, untuk memenuhi segala keperluan itu. Hak-hak ini adalah beberapa dari sejumlah hak yang diucapkan oleh kaum perempuan dalam Piagam Perempuan yang dipakai pada kampanye Koalisi Nasional Perempuan pada tahun 1994. Konstitusi ini juga berisikan hak-hak anak dan hak-hak pekerja. Konstitusi ini juga memasukkan pasal yang memungkinkan perempuan memakai Piagam Perempuan dan piagam-piagam lainnya sehingga nantinya dapat dipakai sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah.

Cara: Kebijakan Melingkupi yang Mendukung Perempuan

Pemerintahan yang terpilih pada tahun 1994 dan 1999, yang dipimpin oleh ANC, telah berusaha membangun dan menyaring kebijakan mengenai perempuan berdaya lingkup efektif yang dapat memandu departemen-departemen pemerintah dalam tugas mereka. Mereka telah berusaha dengan sangat giat untuk menempatkan isu-isu perempuan ke dalam arus utama, menarik mereka keluar dari garis tepi pembahasan kebijakan dan menaruh mereka di barisan depan. Dalam proses ini, anggota parlemen perempuan telah memainkan peranan yang amat penting.

Sebagai bagian dari upaya-upaya permulaan dalam membawa isu-isu gender ke garis terdepan, kantor Program Rekonstruksi dan Pembangunan mengadakan konsultasi dengan anggota parlemen perempuan. Kantor ini juga membuat Program Pemberdayaan Perempuan dan memasukkan bagian tentang perempuan dalam Buku Putih-nya pada tahun 1994. Selain itu, dibuat pula rancangan kebijakan yang terpisah untuk pemberdayaan perempuan pada bulan Juli 1995, yang menjadi pedoman bagi departemen-departemen pemerintah untuk menjamin partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam tugas mereka.

Kerja yang dibangun Sub-Dewan Komite Eksekutif Transisi tentang Status Perempuan kemudian diambil-alih perempuan-perempuan parlemen dan dilanjutkan dengan persiapan untuk Konferensi Dunia IV tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995. Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan Program Rekonstruksi dan Pembangunan, mereka mempersiapkan sebuah laporan yang diajukan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa; mereka juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan internasional dan regional lainnya menjelang konferensi perempuan. Persiapan dan pembahasan untuk Beijing memperkaya perkembangan gerakan kebijakan gender. Laporan negara tahun 1994 tentang status perempuan Afrika Selatan membeberkan persoalan bercakup luas yang dihadapi oleh perempuan Afrika Selatan, seperti kemiskinan, kekerasan dan akses tidak setara pada sumber-sumber daya (entah keuangan, pendidikan, kesehatan, atau lapangan pekerjaan).

Menyusul Konferensi Dunia IV tentang Perempuan di Beijing, pemerintah kemudian menerima Platform Aksi. Departemen-departemen pemerintah lantas mengidentifikasi tindakan apa yang dapat mereka jalankan dalam kurun waktu tertentu untuk membantu proses pencapaian kesetaraan gender. Ini tidak hanya termasuk bidang-bidang perhatian seperti perempuan dan kesehatan, tetapi juga mekanisme untuk meningkatkan kemajuan perempuan di Afrika Selatan pada umumnya. Tindakan pemerintah dalam konteks Platform Aksi Beijing semakin dipertegas dengan ratifikasinya, tanpa ada reservasi, Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1995.

Peralatan Nasional

Sejumlah peraturan telah diambil untuk membangun peralatan nasional yang akan menerapkan kesetaraan gender dan non-seksisme secara efektif pada pelbagai tataran pemerintahan. Kantor Status Perempuan telah dibentuk dilingkungan kantor kepresidenan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan kebijakan tentang perempuan di tingkat nasional. Kantor ini juga telah didirikan di lingkungan kantor perdana menteri untuk mengkoordinasikan kebijakan di tujuh dari sembilan propinsi yang ada.

Tugas Kantor Status Perempuan adalah mengedepankan dokumen Kebijakan Pemberdayaan Nasional, menentukan basis informasi dan meluncurkan kegiatan-kegiatan pngarus-utamaan gender pada aras nasional dan popinsi. Hal ini akan menjamin bahwa isu-isu gender juga menjadi arus utama di departemen-departemen pemerintah dan bahwa CEDAW dan

Program Aksi, yang masing-masing disetujui di Dakar dan Beijing, bisa diterapkan secara efektif.

Tambahan pula, parlemen telah mensahkan legislasi untuk membentuk Komisi Nasional Kesetaraan Gender. Komisi ini memulai kerjanya pada tahun 1997. Tugas komisi ini adalah mempromosikan kesetaraan gender di tengah masyarakat dan menjamin bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga bukan pembuat peraturan lainnya melaksanakan komitmen mereka terhadap kesetaraan gender. Komisi akan melibatkan masyarakat madani dan struktur-struktur pemerintah dalam isu-isu gender, memantau keadaan, dan menyokong kesetaraan gender dengan berbagai cara. Komisi ini terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang dipilih oleh parlemen dan disetujui presiden.

Komisi Hak Asasi Manusia dan Kantor Pelindung Publik, yang didirikan oleh parlemen, juga memainkan peranan penting dalam melindungi hak-hak asasi perempuan, sebagaimana telah digariskan dalam konstitusi.

Kebijakan Departemen

Perempuan di parlemen telah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kerja departemen-departemen pemerintahan, khususnya pada proyek-proyek yang mempengaruhi mereka, seperti proyek perumahan, pengairan, kehakiman, pemerintah lokal, perdagangan dan perindustrian. Bagian-bagian untuk urusan gender telah dibentuk diberbagai departemen yang dihubungkan dengan Kantor Status Perempuan. Departemen-departemen pemerintah mengeluarkan dokumen-dokumen kebijakan penting dan menjalankan bermacam prakarsa yang memprioritaskan kembali pekerjaan mereka, untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dan khususnya bagi perempuan. Berikut ini adalah garis-garis besar tentang bagaimana berbagai departemen mematuhi agenda yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perempuan:

- Departemen Kesehatan telah berusaha menciptakan sistem perawatan kesehatan primer yang bisa dengan mudah didapatkan oleh perempuan dan anak-anak di manapun.
- Departemen Kesejahteraan telah memprakarsai proyek percontohan khusus untuk orang yang menanggung risiko, terutama ibu tunggal.
- Departemen Pengairan dan Kehutanan telah memprakarsai program kehutanan masyarakat, untuk mencapai penghutanan kembali dengan cara berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat pedesaan tidak hanya secara lingkungan tetapi juga secara finansial.

- Departemen Perdagangan dan Perindustrian telah mengambil tindakan nyata untuk kesetaraan gender dengan membuat kebijakan dan menjalankan program-program peningkatan akses perempuan pada usaha kecil dan peluang-peluang pendanaan.
- Departemen Kehakiman telah memberlakukan beberapa undang-undang dan dokumen-dokumen kebijakan untuk mengatasi isu-isu perkawinan, perceraian, kekerasan rumah tangga, perkosaan dan harta warisan. Departemen ini juga mengajukan program dan kampanye-kampanye untuk meningkatkan akses perempuan pada keadilan dan menjamin agar sistem hukum tanggap terhadap perempuan. dengan cara yang tepat dan terjangkau.

Prakarsa dan Legislasi Lain

- Komite yang bertugas mengurus keuangan telah mengajukan “proses anggaran perempuan,” yang bertujuan untuk menganalisa anggaran pemerintah dari perspektif gender untuk menekan pemerintah agar mengalokasikan dana bagi pemberdayaan dan pengembangan perempuan. Proyek ini telah dipakai oleh negara-negara persemakmuran (*Commonwealth*) sebagai kajian percontohan.
- Beragam jenis legislasi dan kebijakan yang telah disahkan atau masih dalam pembahasan tampaknya akan meningkatkan kehidupan rakyat Afrika Selatan pada umumnya, dan perempuan pada khususnya. Cakupan legislasi dan kebijakan-kebijakan itu disekitar perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor pertanian, penyetaraan manfaat kemakmuran bagi kaum tua, keadilan yang bermanfaat dalam perawatan anak-anak. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, penyediaan bantuan hukum gratis bagi mereka yang membutuhkan, penghapusan undang-undang kehamilan, perlindungan terhadap rakyat dengan memberi jaminan pemilikan atas hak-hak tanah mereka yang hilang, dan juga Sekolah Hukum Afrika Selatan (antara lain menjamin wajib belajar sepuluh tahun, badan-badan pemerintahan bersifat demokratis pada aras sekolah dan kurikulum 2005).

Hasil: Penyerahan Sumber-sumber Daya kepada Perempuan dan Kaum Miskin

Buah dari kebijakan pemerintah dan legislasi parlementer kini mulai terlihat dengan penyerahan sumber-sumber daya kritis dan pelayanan kepada rakyat termiskin Afrika Selatan. Beberapa prestasi yang pernah dicapai antara tahun 1994 dan 1999 adalah sebagai berikut:

Perempuan tidak akan mampu meraih hasil-hasil ini dan memajukan kepentingan mereka jika sejak awal mereka tidak mengorganisir perempuan ke dalam kelompok-kelompok perempuan di dalam partai-partai mereka dan pada aras multi-partai.

- Pembangunan 260 klinik, yang dipusatkan di wilayah pedesaan yang paling tidak beruntung, dan meningkatkan kondisi 2.358 klinik;
- Pembaruan undang-undang perpajakan, menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pajak penghasilan;
- Perbaikan 1.497 sekolah dan pembangunan 4.308 ruang kelas;
- Penyediaan makanan bagi 5,5 juta anak-anak melalui program pemberian makan sekolah;
- Imunisasi bagi 63,3 persen dari seluruh bayi yang berusia dibawah setahun dan sebagai tambahan, 10 persen untuk yang usia dua tahun;
- Memberikan perawatan kesehatan gratis untuk anak-anak di bawah usia enam tahun dan untuk ibu hamil;
- Menyetujui program pemberian pelayanan dasar pengairan dan sanitasi bagi jutaan rakyat;
- Menyediakan subsidi perumahan bagi jutaan rakyat dan membangun hampir satu juta rumah tinggal;
- Menyediakan infrastruktur kotapraja termasuk air, listrik, sanitasi, pembuangan sampah padat, jalan, saluran angin dan fasilitas masyarakat bagi kepentingan 3,5 juta rakyat;
- Program penyediaan listrik untuk 313.179 rumah tangga, yang menghubungkan 1,5 juta orang;
- Program-program penyediaan listrik bagi 25.900 sekolah desa dan sekitar 2.000 klinik desa.

Jalan ke Depan

Perempuan tidak akan mampu meraih hasil-hasil ini dan mamajukan kepentingan mereka jika, sejak awal, mereka tidak mengorganisasi diri mereka ke dalam kelompok-kelompok perempuan di dalam partai mereka dan dalam arus multipartai. Mereka juga diuntungkan oleh komitmen dan tindakan-tindakan perempuan di luar parlemen. Mereka mampu melanjutkan kemajuan mereka berkat hubungan dan partisipasi mereka dalam organisasi-organisasi perempuan dan ornop dalam masyarakat.

Jalan yang ditempuh anggota parlemen perempuan bukanlah hal yang mudah. Ketika perempuan masuk ke dalam parlemen dengan jumlah sebesar itu, hanya tersedia sedikit fasilitas bagi mereka, termasuk kamar kecil di beberapa gedung atau lantai. Beberapa kamar kecil laki-laki kemudian disulap menjadi kamar kecil perempuan; pusat perawatan sehari-hari parlemen ikut dibangun, serta program parlemen dan waktu duduk disesuaikan dengan persyaratan dan kebutuhan perempuan.

Banyak anggota parlemen perempuan terus berjuang untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan tuntutan pekerjaan yang masih memasukkan jam lembur, perjalanan dan fasilitas yang sangat sedikit. Perempuan harus terus-menerus bekerja keras karena mereka perlu berpartisipasi dalam berbagai komite; membuat jaringan dengan perempuan di luar parlemen; dan memuaskan partai serta para pemilih mereka. Di samping semua itu, mereka masih harus memainkan peran sebagai ibu, isteri, saudara perempuan dan nenek.

Masih sangat banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, kendati tenaga mulai melemah, agar bisa menghadapi tantangan-tantangan baru di depan dan mempertahankan apa yang telah diraih sebelumnya dengan amat sulit. Sebagaimana mereka berdiri kokoh dalam menghancurkan sistem apartheid, banyak perempuan di parlemen tetap melibatkan diri bekerja demi kehidupan lebih baik bagi seluruh rakyat Afrika Selatan.

Catatan

- 1 Dipersiapkan dengan bantuan bahan-bahan dari Departemen Penelitian Parlementer Kongres Nasional Afrika.
- 2 Lihat <http://www.parliament.gov.za/misc/cabinet.html>.

